
KEBIJAKAN EKONOMI KETAHANAN PANGAN DENGAN STRATEGY *BLUE ECONOMY* MENGHADAPI ANCAMAN PERUBAHAN IKLIM

Oleh

Asep Adang Supriyadi¹, Gabriel Choirul Alman², Rianto³, Juliana⁴, Suci Rahmayanti⁵, M. Asa'ari Yusuf⁶, Ria Anggun Ariani⁷, Cosmas Manukalo Danga⁸, Feny Avisha⁹, Lukman Yudho Prakoso¹⁰, Yudi Sutrasna¹¹, Edy Sulistyadi¹²

^{1,4,5,6,10} Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Kawasan IPSC Sentul, Sukahati, Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
16810

²Brawijaya University

Alamat: Jl. MT. Haryono No.163, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota
Malang, Jawa Timur 65145

³STP Trisakti

Jl. IKPN Bintaro No.1, RT.4/RW.10, Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta
Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12330

⁷Universitas Dian Nusantara

Jl. Rw. Dolar No.65, RT.003/RW.007, Jatiraden, Kec. Jatisampurna, Kota Bks, Jawa
Barat 17433

⁹Pusnerbad

Jl. Gunung Sahari 7A No.1, RT.5/RW.3, Gn. Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar,
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10720

⁸Dijenukathan Kemhan RI

Jl. Tanah Abang Timur No.3, RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta
Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110

^{11,12}Prodi Ekonomi Pertahanan, FMP, Universitas Pertahanan Republik Indonesia
Kawasan IPSC Sentul, Sukahati, Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
16810

Email: ¹⁰lukman.prakoso@idu.ac.id

Abstrak

New normal dampak Pandemi Covid-19 belum usai semua negara dihadapkan dengan ancaman global perubahan iklim. Dampak perubahan iklim sangat berpengaruh terhadap ketersediaan pangan untuk penduduk dunia. Ancaman alam yang nyata dan dampak konflik antara negara seperti Perang Rusia Ukraina, konflik di laut China Selatan menambah kompleksitas dinamika lingkungan strategis. Tjuna penulisan ini adalah untuk memberikan rekomendasi terhadap kebijakan ekonomi terkait ketahanan pangan Indonesia. Metode penulisan yang digunakan saat ini adalah kualitatif studi pustaka dengan pendekatan naratif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kebijakan ketahanan pangan saat ini melibatkan kementerian/lembaga dari pemerintah pusat dan daerah yang berjalan sendiri-sendiri dan terdapat tumpang tindih kebijakan,. Terkait pembiayaan dan ketersediaan logistik pendukung seperti pupuk, alat pertanian yang modern efektif dan efisien. Pasar juga menjadi hal krusial yang menjadi pertanyaan Ketika hasil program telah melimpah. Kebijakan import yang sangat deras juga menjadi hal yang ambigu . Sehingga dalam kesimpulan tulisan ini bahwa diperlukan implementasi kebijakan menurut Lukman Yudho Prakoso. Kebijakan ketahanan pangan ini harus dijalankan dengan memperhatikan faktor yang bersifat *Integrative, Interactive, Transparency, Controlling dan Accountability* (IITCA).[. Selanjutnya rekomendasi Kebijakan ekonomi ketahanan pangan dengan *Strategy Blue Economy*

Menghadapi Ancaman Perubahan Iklim adalah model pengelolaan ketahanan pangan dengan adanya *command center*, menjadi novelty atau temuan penting dalam tulisan ini.

Keywords: Katahanan Pangan, Integratif, Interaktif, Transparan, Kontrol, Akuntabel

PENDAHULUAN

Sektor pertanian Indonesia dihadapkan dalam ancaman dampak perubahan iklim yang terjadi secara global. Ketahanan pangan nasional berpotensi terpengaruh apabila sistem pertanian Indonesia tidak disiapkan menggunakan cara yang terbaik. Adapun, beberapa dampak perubahan iklim diantaranya merupakan cuaca ekstrem, misalnya hujan lebat, kekeringan, gelombang panas, dan badai tropis. Dampak tersebut sangat mempengaruhi proses tanam dan produk pertanian nasional. Oleh karena itu, masa depan sistem pangan kita bergantung pada kemampuan kita untuk beradaptasi dan menciptakan sistem pangan yang tangguh. Menciptakan sistem pangan yang tangguh untuk beradaptasi dengan dampak perubahan iklim harus menjadi prioritas utama bagi Indonesia.[1]

Prof Rockhmin Dahuri, dalam acara seminar fakultas manajemen pertahanan Unhan RI pada tanggal 29 September 2022 mengatakan bahwa tantangan pembangunan utama Indonesia adalah bahwa sudah 77 tahun merdeka, tetapi status (pencapaian) pembangunannya baru sebagai negara berpendapatan-menengah bawah (*lower-middle income country*), dengan GNI (*Gross National Income*) per kapita hanya US\$ 3.870 pada 2021. Padahal, suatu negara-bangsa bisa dinobatkan sebagai negara maju dan makmur (*high-income country*), bila GNI per kapitanya > US\$ 12.695 (Bank Dunia, 2021).[2]

Hal ini harus segera diatasi, sebab dari sekitar 194 negara anggota PBB, menurut World Bank sampai sekarang baru 55 negara (28%) yang telah mencapai status negara maju dan makmur. menurut laporan *Credit Suisse's Global Wealth Report* 2019, 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 44,6% kue kemakmuran secara nasional, sementara 10% orang terkaya menguasai 74,1%. "Kekayaan 4

orang terkaya (US\$ 25 M = Rp 335 T) sama dengan total kekayaan 100 juta orang termiskin (40% penduduk) Indonesia.

Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru muncul sebagai respon untuk mengoreksi kegagalan Paradigma Ekonomi Konvensional (Kapitalisme) dimana 1,8 miliar orang masih miskin, 700 juta orang kelaparan, ketimpangan ekonomi yang semakin melebar, krisis ekologi, dan Pemanasan Global. Ekonomi Hijau adalah ekonomi yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi secara signifikan. [3]

Pada dasarnya, *Blue Economy* merupakan penerapan Ekonomi Hijau di wilayah laut (*in a Blue World*). Ekonomi Biru berarti penggunaan laut dan sumber dayanya untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan. Mengutip World Bank, 2016 Ekonomi Biru adalah penggunaan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan umat manusia, dan secara simultan menjaga kesehatan serta keberlanjutan ekosistem laut. Ekonomi Biru adalah semua kegiatan ekonomi yang terkait dengan lautan dan pesisir. Ekonomi Biru mencakup berbagai sektor-sektor ekonomi mapan (*established sectors*) dan sektor-sektor ekonomi yang baru berkembang (*emerging sectors*) (EC, 2020). Ekonomi biru juga mencakup manfaat ekonomi kelautan yang mungkin belum bisa dinilai dengan uang, seperti *Carbon Sequestration, Coastal Protection, Biodiversity, dan Climate Regulator*.

METODE PENELITIAN**a. Metode Deskriptif Kualitatif Studi Pustaka**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi Pustaka (*library research*) yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama [4]. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti [5].

b. Teori Implementasi kebijakan pertahanan Lukman Yudho Prakoso (IITCA).

Kebijakan publik di sektor pertahanan merupakan salah satu faktor penting yang ikut berperan dalam pembangunan kekuatan pertahanan nasional. Kebijakan dapat menghasilkan manfaat secara optimal jika diimplementasikan dengan tepat, yaitu dengan mempertimbangkan dan memenuhi beragam faktor yang mempengaruhi proses implementasi. Menurut Prakoso (2016), faktor-faktor tersebut terdiri dari factor *Integrative, Interactive, Transparency, Controlling dan Accountability* (IITCA).[6]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu yang paling strategis dalam pertanian dan pembangunan nasional, terutama di negara berkembang seperti Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar. Di sisi lain, ketahanan pangan juga merupakan fenomena yang sangat kompleks yang mencakup banyak aspek dan faktor yang saling terkait dari perspektif yang berbeda. Kompleksitas masalah ketahanan pangan sangat penting untuk diperhatikan dalam merumuskan kebijakan pembangunan, karena ketahanan pangan bukan hanya masalah perut, tetapi juga dapat mempengaruhi sektor lain, bahkan berdampak pada pertahanan negara dan pertahanan negara. gangguan dan keamanan, karena selain sebagai barang ekonomi, ketahanan pangan merupakan komoditas yang juga memiliki fungsi lain, yaitu sosial dan politik, regional, nasional dan global.

Ancaman terhadap pertahanan dan keamanan yang timbul dari kerawanan pangan dapat timbul jika kita tidak dapat menyediakan pangan sendiri bagi masyarakat, dalam hal ini kita harus mengimpor dari negara lain. Jika kebutuhan pangan kita dipenuhi dengan mengimpor dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang lama, maka kondisi ini membuat kita bergantung pada negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan kita. Kondisi ketergantungan ini tentu sangat berbahaya bagi pertahanan, karena suatu saat kita akan menghadapi masalah diplomatik dengan negara itu, mereka akan memberlakukan embargo yang memotong makanan dari negara itu, yang tentu saja dapat berdampak pada terjadinya kejahatan. krisis pangan di negara kita. Dan jika terjadi krisis pangan, juga mempengaruhi semua bidang kehidupan, seperti pencurian, perampokan dan kejahatan lainnya untuk memenuhi kebutuhan pangan, sehingga jika berlangsung lama akan mengganggu stabilitas negara.

Di sisi lain, ketersediaan pangan yang terbatas juga dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dan produktivitas masyarakat, karena keterbatasan pangan secara langsung berdampak pada pengurangan konsumsi pangan baik oleh anak maupun orang tua. Jika terjadi pada anak-anak akan menghambat tumbuh kembang anak sehingga di kemudian hari lahir generasi yang tidak kompeten, sedangkan orang dewasa kurang semangat untuk bekerja dan semangat, karena tidak cukup tenaga bahkan untuk melakukan aktivitas, bisa juga terjadi kecacatan. melakukan aktivitas karena sakit.

Besarnya dampak kerawanan pangan memaksa kita untuk secara serius mempertimbangkan berbagai strategi yang dapat semakin memperkuat ketahanan pangan kita baik secara regional maupun nasional. Strategi dan kebijakan yang digunakan harus mampu memberikan jawaban atas berbagai permasalahan ketahanan pangan daerah. Dan mengingat kompleksnya permasalahan yang ada, tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor saja, tetapi harus dilakukan secara terpadu dan

terintegrasi antar sektor yang berbeda dalam kaitannya dengan ketahanan pangan. Karena sebenarnya, keamanan pangan bukan hanya tentang produksi atau ketersediaannya, tetapi juga tentang distribusi, pengolahan, variasi dan keamanan pangan yang didistribusikan kepada masyarakat.

a. Kondisi Saat Ini

Kondisi ketahanan pangan saat ini menjadi suatu kondisi yang harus kita cermati. Tantangan ketahanan pangan yang ada saat mulai dari rendahnya produktivitas sejumlah komoditas pangan, ketergantungan impor yang tinggi, hingga adanya *mismatch* geografis dari supply dan demand.[7]

Menurut *Global Food Security Index* (GFSI), ketahanan pangan Indonesia memang akan memburuk pada 2021 dibandingkan tahun lalu. Menurut GFSI, skor ketahanan pangan Indonesia mencapai 61, pada tahun 2020. Namun pada tahun 2021, indeks tersebut turun menjadi 59,2. Indeks membuat Indonesia berada di peringkat 69 dari 113 negara untuk ketahanan pangan pada tahun 2021.

GFSI mengukur ketahanan pangan negara menggunakan empat indikator utama, yaitu keterjangkauan pangan, ketersediaan pasokan, nilai gizi dan ketahanan pangan, serta sumber daya alam dan keberlanjutan.

Menurut GFSI, pangan di Indonesia cukup terjangkau dan tersedia dibandingkan negara lain. Namun, infrastruktur pertanian dan pangan Indonesia masih di bawah rata-rata dunia. Standar gizi dan keragaman makanan pokok juga masih dinilai rendah. Ketahanan sumber daya alam Indonesia juga dianggap rendah, karena tidak dilindungi oleh kebijakan politik yang kuat dan rentan terhadap perubahan iklim, peristiwa cuaca ekstrem, dan bencana terkait pencemaran lingkungan.

b. Kondisi yang diharapkan

Indonesia perlu menjadi penghasil pangan besar di dunia untuk menjaga cadangan pangan dalam negeri serta untuk memastikan terjaminnya stok pangan nasional. Kebijakan ekonomi dengan menggunakan

model yang paling tepat model *Blue Economy* menjadi basis terkuat dihadapkan potensi yang dimiliki Indonesia sebagai negara maritim.

Penggunaan kebijakan ekonomi model *blue economy* dapat terselenggara dengan baik jika memperhatikan . faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor *Integrative, Interactive, Transparency, Controlling dan Accountability* (IITCA).

1) Integratif.

Isu ketahanan pangan sangat kompleks dan tidak hanya melibatkan satu sektor saja, oleh karena itu diperlukan sinergi dan integrasi semua pihak. Untuk mendorong pertumbuhan produksi yang berkelanjutan, pemerintah diharapkan menerapkan kebijakan moneter dan keuangan khusus untuk mendukung industri pertanian di berbagai bidang seperti kebijakan bunga kredit perbankan, insentif pajak, pertanggung jawaban asuransi, dan gangguan produksi akibat kebijakan iklim dan harga.[8]

2) Interaktif.

Kebijakan ekonomi ketahanan pangan dengan *Strategy Blue Economy* Menghadapi Ancaman Perubahan Iklim membutuhkan adanya proses komunikasi yang bersifat interaktif, sehingga memungkinkan tersampainya berbagai informasi penting antar pihak yang menjadi pelaksana kebijakan. Komunikasi yang interaktif juga dapat meminimalis penolakan yang terjadi atas kebijakan yang diimplementasikan karena adanya pemahaman yang lengkap terhadap tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan.

3) Transparan.

Faktor ini pada kebijakan ekonomi ketahanan pangan dengan *strategy blue economy* Menghadapi Ancaman Perubahan Iklim sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap negara dan kebijakan pertahanan yang diimplementasikan. Dengan adanya transparansi, maka masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya untuk dapat mengawasi negara. Pada umumnya, transparansi berkaitan dengan transparansi dalam hal perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran.

4) Kontrol.

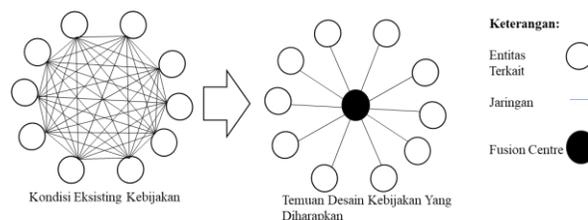
Merupakan faktor yang menentukan kesesuaian antara kebijakan ekonomi ketahanan pangan dengan *strategy blue economy* menghadapi ancaman perubahan iklim dengan rencana kebijakan. Dengan adanya pengawasan, maka berbagai kesalahan yang terjadi selama proses implementasi dapat terdeteksi dengan segera dan dapat dicarikan solusi yang paling tepat, sehingga implementasi kebijakan dapat tetap berjalan dengan arah yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

5) Akuntabel.

Faktor yang menjadi pembentuk utama dari kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan ekonomi ketahanan pangan dengan *Strategy Blue Economy* menghadapi ancaman perubahan iklim dan lembaga yang berwenang dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan tersebut. Akuntabilitas merupakan hasil dari pelaksanaan tanggung jawab, yang dapat dicapai seiring dengan pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat atas manfaat dari segala aktivitas dari lembaga pemerintahan yang dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat. Akuntabilitas dapat terbentuk melalui pelaksanaan sosialisasi secara terbuka terhadap masyarakat yang merupakan pihak yang memberi amanat kepada lembaga pemerintahan dalam kebijakan ekonomi ketahanan pangan dengan *strategy blue economy* menghadapi ancaman perubahan iklim.

c. **Solusi *Command Center* Ketahanan pangan *Blue Economy* sebagai solusi.**

Implementasi kebijakan ketahanan pangan diantara peluang dan ancaman di masa yang akan datang memiliki peluang yang sangat baik, namun tetap harus memerhatikan bahwa tetap ada tantangan dan hambatan yang bisa menjadi ancaman. Hal ini harus juga diperhitungkan dan dicarikan solusinya, sehingga kemanfaatan sebesar-besarnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Pembahasan yang telah di laksanakan pada bagian sebelumnya dapat menjadi dasar dalam memberikan solusi seperti di bawah ini.



Gambar 1. Taksonomi *Command Center* Kebijakan Ketahanan Ekonomi

Kondisi saat ini, pelaksanaan kebijakan terkait kebijakan ketahanan pangan diantara peluang dan ancaman di masa datang, dilaksanakan oleh berbagai entitas dengan masih melakukan proses yang belum terintegrasi secara penuh, sehingga masih memungkinkan terjadinya permasalahan yang tidak terkoordinasi satu sama lain entitas terkait.

Peneliti merekomendasikan transformasi jaringan kerja yang semula adalah menggunakan jaringan Star seperti pada gambar di atas, ditransformasikan ke dalam bentuk jaringan roda, dimana perlu ada koordinator terpusat (*Command Center*) agar segala keputusan yang diambil dapat terkoordinir dengan baik, sehingga jika ada gangguan hambatan dan ancaman dapat di respon dengan cepat.

KESIMPULAN

Kebijakan ekonomi ketahanan pangan dengan *Strategy Blue Economy* menghadapi ancaman perubahan iklim sangat dibutuhkan segera untuk diimplementasikan. Dihadapkan dengan ancaman faktual dan potensial dirasa perlu untuk menyegerakan pelaksanaan kebijakan ketahanan tersebut disebabkan belum optimalnya program ketahanan pangan. Indonesia telah memiliki visi poros maritim dunia dengan meletakkan pembangunan ekonomi di sektor maritim. Kebijakan ketahanan pangan ini harus dijalankan dengan memperhatikan faktor yang bersifat *Integrative, Interactive, Transparency, Controlling dan Accountability* (IITCA). Selanjutnya rekomendasi tulisan ini adalah

model pengelolaan ketahanan pangan dengan adanya *command center* kebijakan ekonomi ketahanan pangan dengan *Strategy Blue Economy* menghadapi ancaman perubahan iklim, menjadi *novelty* atau temuan penting dalam tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Yustinus Andri (2022), Terancam Perubahan Iklim, Sektor Pangan Indonesia Harus Waspada, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220214/12/1499937/terancam-perubahan-iklim-sektor-pangan-indonesia-harus-waspada>., dikutip tanggal 29 September 2022.
- [2] Askara (2022), Prof. Rokhmin Dahuri: Ekonomi Biru Perwujudan Poros Maritim Dunia dan Penguatan Pertahanan Negara, <https://www.askara.co/read/2022/09/28/31193/Prof.-Rokhmin-Dahuri:-Ekonomi-Biru-Perwujudan-Poros-Maritim-Dunia-dan-Penguatan-Pertahanan-Negara>, dikutip tanggal 29 September 2022.
- [3] UNEP(United Nations Environment Programme), Global Guidance Principles For Life Cycle Assessment Database (A basis for greener Processes and Products), ISBN: 978-92-807-3174-3 DTI/1410/PA, 2011
- [4] Hadi, S. 1995. Metodologi Research Jilid 3. Metodologi Research Jilid 3. Yogyakarta: Andi Offset.
- [5] Ida Bagoes Mantra. 2008. Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- [6] Prakoso, L. Y. (2016). Akuntabilitas kinerja pengadaan barang jasa di akademi Angkatan Laut Surabaya (Studi model akuntabilitas kinerja berbasis Good Governance dalam pengadaan barang jasa alat instruksi/alat penolong instruksi). Universitas 17 Agustus 1945.
- [7] Elsa Catriana (2021) Ini Tantangan Ketahanan Pangan di Indonesia, , <https://money.kompas.com/read/2021/05/04/130132626/ini-tantangan-ketahanan->

[pangan-di-indonesia](#). Dikutip tanggal 29 September 2022.

- [8] Antara 92012), Ketahanan Pangan Perlu Sinergi dan Integrasi <https://investor.id/macroeconomics/29671/ketahanan-pangan-perlu-sinergi-dan-integrasi>, dikutip tanggal 29 September 2022.